

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) TAHUN 2025

**DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAGNAKERKOP UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 641 /KEP/PTK-UKM/ 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS DAGNAKERKOP UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS DAGNAKERKOP UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang** : a. bahwa dokumen Renja OPD berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis Renstra OPD untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi serta Arah Kebijakan teknis;
- b. bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Dagnakerkop UKM tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Dagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016, tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAGNAKERKOP UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PERUBAHAN OPD) DINAS DAGNAKERKOP UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Dinas Dagnakerkop UKM ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2005-2025;
4. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
5. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Padang Pariaman;

BAB II

SISTEMATIKA RENJA DINAS DAGNAKERKOP UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Dagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DAGNAKERKOP UKM TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Isi dan uraian Renja Perubahan OPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Dagnakerkop UKM ini.

Pasal 4

Renja OPD Tahun 2025 merupakan pedoman seluruh Komponen Dinas Dagnakerkop UKM dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Dinas Dagnakerkop UKM ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 04 Juli 2025

Kepala Dinas Perdagangan tenaga kerja koperasi dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman


ION KENEDI, S. Sos. MM
NIP. 19690525 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman. Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, Program-Program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang

tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Pariaman , 04 Juli 2025
KEPALA DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA
KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



JON KENEDI, S. SOS. MM
NIP. 19690525 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	12
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TRIWULAN II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	62
2.3 Isu – isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	96
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja ...	97
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS DAGNAKERKOPUKM .	132
3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional dan Daerah	132
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	137
3.3 Program dan Kegiatan	141
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	161
BAB V PENUTUP	187

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra	22
Tabel 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	31
Tabel 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	31
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman s/d Tahun 2024	38
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	85
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	86
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Sasaran 1	88
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Sasaran 2	89
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sasaran 3	90
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Sasaran 4	91
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Sasaran 5	92
Tabel 2.9 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	93
Tabel 2.10 Review terhadap Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 ..	99
Tabel 3.1 Keselarasan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029	133
Tabel 3.2 Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	135
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	139
Tabel 3.4 (TC 33) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	145
Tabel 4.1 MATRIKS RENJA FORMAT SIPD	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan Pembangunan di Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah mencerminkan komitmen dan rencana setiap Perangkat Daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Perubahan Renja Perangkat Daerah juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai target-target Pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Perubahan Renja Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah Pembangunan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Pentingnya Perubahan Renja Perangkat Daerah juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Keselarasan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan yang lebih tinggi, seperti

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Dokumen Perencanaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, menjadi kunci untuk mewujudkan Pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di Tingkat Daerah dapat sejalan dengan prioritas Pembangunan Nasional.

Perubahan Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai bagian penting dari siklus Anggaran Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung Pembangunan Daerah secara berkelanjutan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah Dokumen Perencanaan Tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Renja Perangkat Daerah merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target-target Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus Perangkat Daerah selama Satu Tahun Anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan, Perubahan Renja Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaras dengan kebijakan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Perubahan Renja Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-Perangkat Daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Perubahan Renja Perangkat Daerah harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan Pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Perubahan Renja Perangkat Daerah juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program Pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi

masalah yang dihadapi oleh Perangkat Daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi Tugas Pokok Perangkat Daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan. Perangkat Daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, Perangkat Daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, baik di Tingkat Daerah maupun Nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai Dokumen Perencanaan lainnya, baik di Tingkat Daerah maupun Nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah Dokumen Perencanaan Tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD). Perubahan Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah mendukung prioritas Pembangunan Daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Perubahan Renja Perangkat Daerah juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah untuk periode Lima Tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Strategi yang akan ditempuh oleh Perangkat Daerah untuk mencapai target Pembangunan yang ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

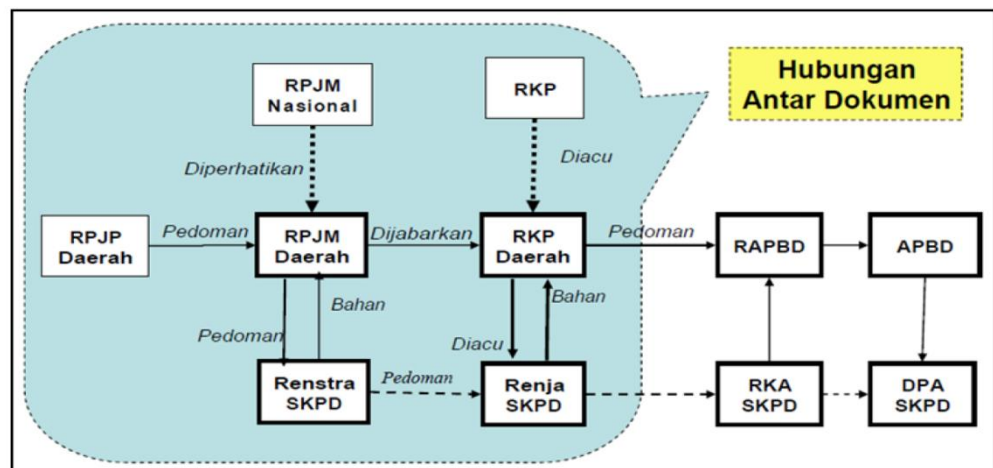
Tidak hanya itu, Perubahan Renja Perangkat Daerah juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan Dokumen Perencanaan di Tingkat Nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-Pemerintah Daerah atau memerlukan sinergi dengan Kebijakan Nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja Perangkat Daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun Nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi

sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Perubahan Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Perubahan Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Perubahan Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai Program dan Kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Perubahan Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Perubahan Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Perubahan Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan Visi besar Pembangunan Daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Jangka Menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah Pembangunan Daerah untuk lima tahun ke depan, dan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional.

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga

Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Perubahan Renja Dinas memastikan Penggunaan Anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target Jangka Menengah, sekaligus memastikan bahwa Anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman merupakan implementasi dari Visi dan Misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong Pembangunan Daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Perubahan Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama

Pemerintah Daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik Dinas dan arah Pembangunan Kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan sasaran operasional dalam Perubahan Renja. Dalam konteks ini, Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam Bidang Kesehatan, maka Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman akan mencakup program-program yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Renja, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pengalokasian Anggaran agar sejalan dengan kemampuan Keuangan Daerah yang tercantum dalam RKPD. Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman didesain untuk mengoptimalkan Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang

tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Sasaran Kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Perubahan Renja adalah Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat Program, Kegiatan, dan Anggaran yang akan dilaksanakan dalam Satu Tahun Anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Perubahan Renja merupakan pelaksanaan konkret dari Arah Kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Perubahan Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar Program dan Kegiatan Tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan Tujuan Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian Visi dan Misi Jangka Menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Perubahan Renja tahun 2025 harus selaras dengan Visi Pembangunan Daerah, seperti Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Infrastruktur Daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Perubahan Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Perubahan Renja. Dengan demikian, Perubahan Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi Pencapaian Kinerja Dinas Dalam Jangka Pendek, sehingga Dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Perubahan Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Perubahan Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap Pencapaian Tujuan Strategis Dinas dan Pembangunan Daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dinas di Kabupaten Padang Pariaman.

Perubahan Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan *riil* Perangkat Daerah dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah di Tingkat Perangkat Daerah. Program yang

telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);

20. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
21. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
22. Peraturan Kepala Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop dan UKM Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan Prioritas Kegiatan Pembangunan Daerah, Sasaran dan Target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan Peran, Fungsi, dan Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang Akuntabel, Partisipatif, Bermanfaat, Tepat Sasaran, dan Berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan Arahan yang jelas atas Ttarget Kinerja dari masing-masing Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
4. Sebagai Acuan dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025; dan
5. Sebagai Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM. Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum Penyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOPD, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Triwulan II dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja OPD Triwulan II,

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kinerja Pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti SPM dan SDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan

Awal RKPD, misalnya: terdapat Rumusan Program dan Kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan Program/Kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis Program/Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun Kombinasi Keduanya.

BAB V. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TRIWULAN II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Triwulan II, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi Pencapaian Target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa Program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada Indikator Kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antar unit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah Indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan

demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Triwulan II berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

Tabel 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	70	24	34,28	Persentase	17.399.200	2.800.000	16,09
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100	0	0	Persentase	17.399.200	2.800.000	16,09
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	64	0	0	Persentase	17.399.200	2.800.000	16,09
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	53	31	58	Persentase	24.149.950	0	0

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	2	20	Persentase	24.149.950	0	0
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	20	1	10	Persentase	24.149.950	0	0
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	40	31	77,5%	Persentase	9.504.200	9.161.200	96,4
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30	12	40%	Persentase	9.504.200	9.161.200	96,4
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30	12	40%	Persentase	9.504.200	9.161.200	96,4
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	40	10	25%	Persentase	6.864.000	6.854.000	99,85
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	18	9	50%	Persentase	6.864.000	6.854.000	99,85

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	18	9	50 %	Persentase	6.864.000	6.854.000	99,85
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	40	31	77,5%	Persentase	13.934.500	6.722.400	48,24
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	32	12	37,5	Persentase	13.934.500	6.722.400	48,24
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	18	9	50	Persentase	13.934.500	6.722.400	48,24
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,9	0	0	Persentase		2.795.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemberdayaan	30	5	16,6	Persentase		2.795.000	

N O	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	32	6	18,75	Persentase		2.795.000	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	20	14	70	Persentase		0	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	150	25	16,6	Persentase		0	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	63	10	15,87	Persentase	13.679.800		
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10	2	10	Persentase	6.814.250		
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10	2	10	Persentase	6.814.250		
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	20	15	75	Persentase	6.865.550		

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Tar get	Realis asi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Kabupaten/ Kota								
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	10	5	50	Persentase	6.865.550		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		3,33	0	0	Persentase	6.978.000		
Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1	0	0	Persentase	6.978.000		
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	0	0	Persentase	6.978.000		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		6	3	50	Persentase	13.500.500		
Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		10	8	80	Persentase	6.955.500		

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	6	50	Persentase	6.955.500		
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	4	40	Persentase	6.545.000		
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	7	4	65	Persentase	6.545.000		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3,33	0	0	Persentase	22.859.000		
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	10,5	3,16	30	Persentase	22.859.000		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1100	132	20	Persentase	22.859.000		
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	20	10	50	Persentase	200.841.600	187.432.200	93,3
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	5	3	60	Persentase	200.841.600	187.432.200	93,3

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Tar get	Realis asi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Dalam Negeri								
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	14	15	107	Persentase	200.841.600	187.432.200	93,3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	25	25	Persentase	5.859.410.382	2.852.293.856	48,67
		100	25	25	Persentase			
		100	25	25	Persentase			
		A						
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	100	Persentase	17.082.000		
		5	5	100				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100	Persentase	13.080.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	100	Persentase	4.002.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2	2	100	Persentase	5.241.621.152		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46			Persentase	5.111.126.152		

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	6	50	Persentase	123.560.000	26.490.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	100	Persentase	6.935.000	2.380.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	0	0	Persentase	5.275.000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0	0	Persentase	5.275.000		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	0	0	Persentase	17.500.000	0	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	0	0	Persentase	17.500.000	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	0	0	Persentase	17.500.000	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	0	0	Persentase	17.500.000	0	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0	0	Persentase	40.164.100	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	0	0	Persentase	58.351.000	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	0	0	Persentase	302.602.980	0	0

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	0	0	Persentase	79.080.000	0	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	0	0	Persentase	17.500.000	0	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	0	0	Persentase	10.390.000	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	0	0	Persentase	17.500.000	0	0
	JUMLAH							

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tabel 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

N O	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggara n	Realisas i Anggara n	
		Targe t	Realisa si	%	Satua n	(Rp)	(Rp)	%
NIHIL								
	JUMLAH							

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

N O	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggara n	Realisas i Anggara n	
		Targe t	Realisa si	%	Satua n	(Rp)	(Rp)	%
NIHIL								
	JUMLAH							

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan;

Secara keseluruhan Capaian Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Kurangnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Masih kurangnya SDM, kuantitas maupun kualitas dengan beban kerja yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Kurangnya sarana dan pra sarana pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kendaraan bermotor dan mobiler.
- d. ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana usaha kecil menengah dan masih banyaknya koperasi yang tidak aktif yang perlu dibina kembali karena memiliki volume usaha yang cukup tinggi.
- e. ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana perdagangan, konflik pengelola pasar rakyat perlu ditindaklanjuti dan diantisipasi

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam Pencapaian Kinerja maksimal dalam Teknis Perencanaan Renja, diantaranya :

- a. Keterbatasan Data dan Informasi yang Akurat: Perencanaan yang tepat memerlukan data yang mutakhir, lengkap, dan valid. Ketidaksesuaian data antar bidang atau unit dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan target dan program.
- b. Kurangnya Kapasitas SDM Perencana: Tidak meratanya pemahaman dan kompetensi SDM dalam perencanaan berbasis kinerja dapat memengaruhi kualitas dokumen Renja yang disusun.
- c. Koordinasi Antar Bidang yang Belum Optimal: Kegiatan perencanaan memerlukan sinergi lintas bidang/unit. Ketidakterpaduan antar bidang dapat menyebabkan

tumpang tindih atau adanya program yang tidak selaras dengan prioritas daerah.

- d. **Keterbatasan Waktu Penyusunan:** Proses penyusunan Renja seringkali dikejar tenggat waktu yang ketat, sehingga kurang waktu untuk telaah mendalam terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
- e. **Perubahan Kebijakan yang Mendadak:** Dinamika regulasi dari pemerintah pusat atau daerah yang berubah secara cepat dapat memengaruhi substansi dan arah perencanaan.
- f. **Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Dalam beberapa kasus, perencanaan masih dilakukan secara manual atau semi-digital sehingga belum efisien dan berisiko terjadi kesalahan input/output.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap Program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam Pencapaian Target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung Visi dan Misi Jangka Menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Perdagangan Tenaga

Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan Program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya Potensi Penurunan Capaian Target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. Implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat mengoptimalkan Penggunaan Anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat Realisasi Program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan Peningkatan Beban Kerja dan Kebutuhan Anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas Program yang dilaksanakan, sehingga Capaian Target Program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap Program-Program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Dinas

Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman mungkin mengalami kesulitan dalam menilai Progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan Program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan Target Capaian di tahun 2025 menjadi tidak Realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.

- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan Kebijakan, Perubahan Ekonomi, atau Keadaan Darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, Target yang telah ditetapkan di Awal Periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam Perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar Target Capaian Program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus
Kebijakan Perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang

lebih terperinci untuk tahun 2025. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana Aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap Prioritas Program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada Program-Program yang lebih berkontribusi terhadap Capaian Target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap Program terhadap Pencapaian Visi dan Misi, serta kemampuan Program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2025.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap Program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti *dashboard* kinerja atau sistem pelaporan yang *real-time*, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2025. Evaluasi berkala ini juga

memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi Anggaran jika terdapat Program-Program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung Program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai Target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan Anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan Program.

Tabel 2.1 (T-C 29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman s/d Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
	[Meningkatkan produktivitas tenaga kerja]	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	71	71	71	71	71	71	71	71
	Pelaksanaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi								
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	47 61	47 61	47 61	47 61	47 61	47 61	47 61	47 61
	[Meningkatkan pekerja Indonesia yang terlindungi]	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS								

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Ketenagakerjaan)								
		Persentase keselamatan dan perlindungan pekerja di perusahaan	58,20 %	58,20 %	58,20 %	58,20 %	58,20 %	58,20 %	58,20 %	58,20 %
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan
		Persentase Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja								
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan								
		persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	59 %	59 %	59 %	59 %	59 %	59 %	59 %	59 %
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	10 Perkara	10 Perkara	10 Perkara	10 Perkara	10 Perkara	10 Perkara	10 Perkara
	URUSAN									

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									
	[Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi]	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25	25	25	25	25	25	25	25
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	pesentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	41.05 %	41.05 %	41.05 %	41.05 %	41.05 %	41.05 %	41.05 %	41.05 %

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									
	[Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi]	Persentase Koperasi Aktif	25	25	25	25	25	25	25	25
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang dinilai kesehatan simpan pinjam	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		25	25	25	25	25	25	25	25
	[Meningkatkan produktivitas koperasi]	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kabupaten/kota								
	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		0.33 0.36 65.51	0.33 0.36 65.51	0.33 0.36 65.51	0.33 0.36 65.51	0.33 0.36 65.51	0.33 0.36 65.51	0.33 0.36 65.51	0.33 0.36 65.51
	[Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	24 %	24 %	24 %	24 %	24 %	24 %	24 %	24 %

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra								
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									
	[Meningkatkan daya saing UMKM	Persentase Koperasi yang	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	]	Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	22	22	22	22	22	22	22	22
	[Meningkatkan daya saing UMKM]	Persentase Peningkatan Pengembangan usaha mikro yang berorientasi	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	[Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%)								
		Persentase Temuan BPK	100	100	100	100	100	100	100	100

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang ditindak lanjuti								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					an			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Tersedianya Jasa	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		70	70	70	70	70	70	70	70
	[Meningkatkan Perizinan dan	Persentase Izin Usaha	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendaftaran Perusahaan]	Perdagangan yang Difasilitasi Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIU P Toko Swalayan)								
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Doku men	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya	51 %	51 %	51 %	51 %	51 %	51 %	51 %	51 %

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI									

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERDAGANGAN									
	[Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG									

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PENTING									
	[Meningkatkan Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	57 6	57	57	57	57	57	57	57
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)	43 %	43 %	43 %	43 %	43 %	43 %	43 %	43 %
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
	[Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk]	Persentase penanganan pengaduan konsumen	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	18,98 %	18,98 %	18,98 %	18,98 %	18,98 %	18,98 %	18,98 %	18,98 %

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1100 Unit	1100 Unit	1100 Unit	1100 Unit	1100 Unit	1100 Unit	1100 Unit	1100 Unit
	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
	[Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	18	18	18	18	18	18	18	18
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	persentase Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	2 UMKM	2 UMKM	2 UMKM	2 UMK M	2 UMKM	2 UMKM	2 UMKM

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan Pendekatan Politik, Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif serta pendekatan *bottom-up* dan *top down*.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2021 tentang SOTK, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;**
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;**
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;**
- d) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;**
- e) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis; dan/ atau**
- f) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.**

Pada dasarnya, untuk melaksanakan tugas pokok dinas, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang

Pariaman didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas , Sekretariat, Lima Bidang Teknis Program dan dua UPT yaitu dan Bidang Perdagangan, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Bidang Koperasi, Bidang Pemberdayaan UKM, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal. Yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. perumusan kebijakan umum bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- h. pengendalian pelaksanaan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- i. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- j. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- k. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- l. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta membantu kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/ kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pengelolaan urusan ASN;

- e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Kepala Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan/ atau
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara. Untuk melaksanakan tugasnya, Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Untuk melaksanakan tugasnya, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan/ atau
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang perdagangan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan perdagangan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen, perdagangan dalam dan luar negeri, dan pembinaan pasar;

- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Konsumen

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perlindungan konsumen;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan konsumen;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan konsumen;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan konsumen;
 - e. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
 - f. pengawasan perdagangan minuman beralkohol dan bahan berbahaya;
 - g. pengawasan pupuk dan pestisida dalam pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan konsumen;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

- (1) kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perdagangan dalam dan luar negeri.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dalam dan luar negeri;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perdagangan dalam dan luar negeri;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan perizinan dan pendaftaran perusahaan dalam lingkup Kabupaten;
 - f. penyelenggaraan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok;
 - g. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di tingkat pasar;
 - h. pelaksanaan operasi pasar;
 - i. penyelenggaraan promosi dan kampanye pencitraan produk ekspor;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perdagangan dalam dan luar negeri;
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pasar

- (1) kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta pelaksanaan pembinaan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan pasar;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pasar;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan pasar;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pasar;
 - e. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
 - f. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - g. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - i. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - j. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

- (1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pelatihan tenaga kerja;
- e. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- f. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- g. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan swasta;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelatihan tenaga kerja;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penempatan tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan penempatan tenaga kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang penempatan tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja;
 - e. penyediaan sarana dan pra sarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan

- kerja;
- f. pelaksanaan pengembangan penyediaan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- g. pelayanan antar kerja di daerah kabupaten
- h. perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di kabupaten;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produktivitas Tenaga Kerja

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan produktivitas tenaga kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang produktivitas tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan produktivitas tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang produktivitas tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
 - f. pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang hubungan industrial dan syarat kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang hubungan industrial dan syarat kerja;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat kerja;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan syarat dan norma kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan hubungan industrial;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan syarat dan norma kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan hubungan industrial;
 - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.1 Seksi Syarat dan Norma Kerja

- (1) Seksi Syarat dan Norma Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan syarat dan norma kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Syarat dan Norma Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan

- kegiatan seksi syarat dan norma kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang syarat dan norma kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan syarat dan norma kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang syarat dan norma kerja;
- e. penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerjasama Bipartit;
- f. pembuatan konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di Daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Syarat dan Norma Kerja berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan sebagai bahan perbaikan kinerja;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelatihan tenaga kerja;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang jaminan sosial ketenagakerjaan;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan dan ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. penyiapan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam dan luar negeri;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan hubungan industrial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Hubungan Industrial;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Hubungan Industrial;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Hubungan Industrial;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang Hubungan Industrial;

- e. pelaksanaan persiapan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. pelaksanaan pendaftaran Perjanjian Kerja;
- g. penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Hubungan Industrial dalam dan luar negeri;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Koperasi

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang koperasi;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan koperasi;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pembiayaan koperasi, dan pengawasan dan pengendalian;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pembiayaan koperasi, dan pengawasan dan pengendalian;
 - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1 Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemberdayaan dan pembiayaan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
 - e. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Koperasi

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kelembagaan koperasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kelembagaan koperasi;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan koperasi;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kelembagaan koperasi;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan koperasi;
- e. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- f. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP dengan wilayah keanggotaan dalam satu daerah;
- g. pelaksanaan Diklat perkoperasian;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan koperasi;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian;
- e. pengawasan dan pengendalian kelembagaan dan operasional Koperasi;
- f. pengawasan dan pengendalian pemberdayaan dan pembiyaan koperasi;
- g. pengawasan dan pengendalian penggunaan dana pemerintah oleh Koperasi;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang koperasi;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;

- d. penyelenggaraan kegiatan urusan fasilitasi usaha kecil, pengembangan penguatan dan perlindungan usaha, dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi usaha kecil, pengembangan penguatan dan perlindungan usaha, dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.1 Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha

- (1) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha ;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
 - e. penyiapan kemudahan perizinan;
 - f. pelaksanaan pendampingan penguatan kelembagaan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;

- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - e. pelaksanaan pengembangan akses manajerial, teknologi dan keuangan.
 - f. pelaksanaan peningkatan wawasan kewirausahaan.
 - g. pelaksanaan peningkatan daya saing;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Kecil

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan fasilitasi usaha kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Fasilitasi Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan fasilitasi usaha kecil;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi usaha kecil;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi usaha kecil;
 - d. pelaksanaan pendataan Usaha Kecil Menengah;
 - e. pelaksanaan penciptaan peluang kerjasama, kemitraan dan akses pasar;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi usaha kecil;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dan UPT terdiri dari, 1 eselon II , 1 (satu) eselon IIIa, 5 (lima) eselon IIIb dan 16 (enam belas) eselon IVa. Pada UPT, 1 (satu), eselon IV.B

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Dinas
- b). Sasaran :
 - 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Dinas
 - 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat Dinas
 - 2. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani
 - 3. Persentase Pelayanan yang tepat waktu
 - 4. Nilai SAKIP Dinas

Tabel 2.2 (T-C 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	NIHIL										

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Tabel 2.3

**Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
		No	INDIKATOR SASARAN		Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	1.	Persentase Volume Usaha koperasi	%	5,5	2	36,36	
2.	Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	1.	Persentase Omzet Usaha UMKM	%	3,15	2	63,49	
3.	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat	1.	Cakupan Pedagang Informal	%	20	10	50	

	yang Kondusif dan Terkendali							
4.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Berkualitas	1.	Rasio Penduduk yang bekerja	%	40	20	50	
5.	Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	1.	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	61	30	49,91	
6.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	1.	Nilai SAKIP DisdagnakerkopUKM Hasil Evaluasi Inspektorat	%	82			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :

1) Tidak terdapat indikator yang telah mencapai target kinerja sebesar 100%

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :

- 1) Persentase Volume Usaha Koperasi dengan capaian realisasi sebesar **36,36%** dari target yang ditetapkan.
- 2) Persentase Omzet Usaha UMKM dengan capaian realisasi sebesar **63,49%** dari target yang ditetapkan.
- 3) Cakupan Pedagang Informal dengan capaian realisasi sebesar **50%** dari target yang ditetapkan.
- 4) Rasio Penduduk yang Bekerja dengan capaian realisasi sebesar **50%** dari target yang ditetapkan.
- 5) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan dengan capaian realisasi sebesar **49,91%** dari target yang ditetapkan.
- 6) Nilai SAKIP Disdagnakerkop dan UKM belum dapat diukur karena hasil evaluasi belum tersedia pada saat penyusunan laporan.

I. Sasaran Strategis Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	1.	Persentase Volume Usaha koperasi	%	5,5	2	36,36	

Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan”, indikator kinerja yang digunakan adalah **Persentase** Volume Usaha Koperasi dengan target tahun 2025 sebesar **5,5%**. Berdasarkan realisasi yang mengacu pada capaian kinerja sebagaimana dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023, realisasi indikator tersebut mencapai **2%** atau sebesar **36,36%** dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan volume usaha koperasi belum optimal dan masih memerlukan upaya penguatan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, pengembangan usaha anggota, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan daya saing koperasi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Padang Pariaman.

- II. Sasaran Strategis Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	1.	Persentase Omzet Usaha UMKM	%	3,15	2	63,49	

Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan”, indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Omzet Usaha UMKM dengan target tahun 2025 sebesar 3,15%. Berdasarkan realisasi capaian yang mengacu pada LKjIP Tahun 2023, indikator tersebut terealisasi sebesar 2% atau mencapai 63,49% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan omzet usaha UMKM di Kabupaten Padang Pariaman belum sepenuhnya optimal, meskipun telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya akses pasar, permodalan, pemanfaatan teknologi digital, serta kapasitas manajerial pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan pembinaan, fasilitasi akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan pemasaran agar UMKM mampu meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan daerah.

III. Sasaran Strategis Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	1.	Cakupan Pedagang Informal	%	20	10	50	

Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran “Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang kondusif dan terkendali”, indikator kinerja yang digunakan adalah Cakupan Pedagang Informal dengan target pada tahun 2025 sebesar 20%. Mengacu pada capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam LKjIP Tahun 2023, realisasi indikator tersebut mencapai 10% atau sebesar 50% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan, penataan, dan pemberdayaan pedagang informal telah berjalan, namun belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya jangkauan pembinaan terhadap pelaku usaha informal, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap penataan lokasi usaha, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan program pembinaan, fasilitasi legalitas usaha, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menciptakan kegiatan perdagangan masyarakat yang lebih tertib, kondusif, dan terkendali di Kabupaten Padang Pariaman.

IV. Sasaran Strategis Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Berkualitas	1.	Rasio Penduduk yang bekerja	%	40	20	50	

Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas”, indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Penduduk yang Bekerja dengan target pada tahun 2025 sebesar 40%. Mengacu pada capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam LKjIP Tahun 2023, realisasi indikator tersebut mencapai 20% atau sebesar 50% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman masih belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, terbatasnya kesempatan kerja formal, serta belum optimalnya pelaksanaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan program pelatihan berbasis kompetensi, penguatan hubungan industrial, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman.

V. Sasaran Strategis Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	1.	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	61	30	49,91	

Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran “Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja”, indikator kinerja yang digunakan adalah Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 61%. Mengacu pada capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam LKjIP Tahun 2023, realisasi indikator tersebut mencapai 30% atau sebesar 49,91% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja yang terdaftar masih belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja, belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta masih terbatasnya akses informasi pasar kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, penguatan pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kerja sama dengan perusahaan, serta optimalisasi layanan informasi pasar kerja guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memberikan perlindungan serta kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 :

Tabel

**Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja
Koperasi dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.17	7.15	7.1	7.1	6.69	5.51			
2.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	70	70	70	72	22.5	68			
3.	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	2,430	2,500	2,500	2,500	409	699			
4.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	51	51	51	51	68.68	51			
5.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.31			
6.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	10	10	10	10	26.04	15.3			
7.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	66	68	70	72	4	13.6			
8.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	6.2	6.25	6.3	6.5	22.5	154			
9.	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	59	60	61	62	58.99	59.2			
10.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	75	78	80	82	96.67	78			
11.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0			
12.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	720	730	750	800	240	154			
13.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	80	100	120	160	136	50			
14.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	120	140	160	180	409	50			
15.	Rasio lulusan	56.9	57.2	57.4	67.6	6.85	6.85			

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
.	S1/S2/S3	7	3	3	0					
16.	Rasio penduduk yg bekerja	70.93	70.94	70.95	70.96	20	23,098			
17.	Angka partisipasi angkatan kerja	70.93	70.94	70.95	70.96	65.15	45.99			
18.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	25	26	27	28	8	3			
19.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	1.7	1.8	1.9	2	23.4	45.99			
20.	Pencari kerja yang ditempatkan	4.2	4.5	5.5	6	23.4	154			
21.	Persentase Pengangguran/mencari Pekerjaan	15.22	14	12.88	11.85	6.69	5.51			
22.	Rasio daya serap tenaga kerja	154	169	186	186	0.37	154			
23.	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	2,800	2,900	3,000	3,100	409	154			
1.	Persentase koperasi aktif	42.8	43.75	44.5	45	24,2	21			
2.	Persentase koperasi sehat	40	40	40	40	15,5	21			
3.	Koperasi mampu melaksanakan rat tepat waktu	57	57	57	57	34	47			
4.	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	40	40	40	40	15,5	21			
5.	Persentase UMKM	65	67	69	70	65,34	65,42			
6.	Jumlah UMKM	11,868	12,165	12,469	12,500	22473	22527			
7.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.9	0.9	0.9	0.9	7,8	0,31			
8.	Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom	53	55	57	59	31	47			
9.	Jumlah BPR/LKM	21	24	27	30	0	0			
10.	Jumlah BUMNAG				103	0	0			
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8,6	8,64	8,69	8,71	10,19	10,19			
2.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai	62	62	63	63	6,5	17,02			

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)									
3.	Jumlah Pasar yang Kondusif	1	1	1	1	1	1			
4.	jumlah pasar yang diawasi	17	17	17	17	8	4			
5.	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	2	2	2	2	1	1			
6.	Pasar tertib ukur	1	1	1	1	1	1			
7.	Terwujudnya pasar BANA	1	1	1	1	1	1			
8.	Ekspor Perdagangan Bersih	5.55 0.10 0,30	5.87 0.20 0,20	6.54 0.30 0,70	6.80 0.25 0,10	0	0			
9.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	67,7	67,8 0%	67,9	68,1	10	10			

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan hasil yang bervariasi pada setiap urusan pemerintahan. Pada bidang ketenagakerjaan, beberapa indikator telah melampaui target yang ditetapkan seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, dan Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target seperti jumlah pencari kerja yang ditempatkan, tingkat produktivitas tenaga kerja, dan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Pada bidang koperasi dan UMKM, indikator Persentase UMKM telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan indikator Persentase koperasi aktif, Persentase koperasi sehat, **dan** Persentase koperasi yang melaksanakan RAT masih berada di bawah target. Sementara itu, pada bidang perdagangan, indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, Jumlah pasar yang kondusif, Pasar tertib

ukur, **dan** Terwujudnya pasar BANA telah memenuhi bahkan melampaui target, sedangkan indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, jumlah pasar yang diawasi, serta jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh masih memerlukan upaya lebih lanjut agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada periode perencanaan berikutnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Padang Pariaman dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Wali Kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dari indikator terdapatindikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 - 1) **Persentase Volume Usaha Koperasi** dengan capaian sebesar **36,36%** dari target yang ditetapkan.
 - 2) **Persentase Omzet Usaha UMKM** dengan capaian sebesar **63,49%** dari target yang ditetapkan.
 - 3) **Cakupan Pedagang Informal** dengan capaian sebesar **50,00%** dari target yang ditetapkan.
 - 4) **Rasio Penduduk yang Bekerja** dengan capaian sebesar **50,00%** dari target yang ditetapkan.
 - 5) **Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan** dengan capaian sebesar **49,91%** dari target yang ditetapkan..
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

- 1) **Masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM**, yang ditandai dengan terbatasnya akses terhadap permodalan, pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta kapasitas manajerial dan kewirausahaan pelaku usaha.
- 2) **Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan penempatan pencari kerja**, yang disebabkan oleh masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta terbatasnya kesempatan kerja formal.
- 3) **Belum optimalnya pembinaan dan penataan sektor perdagangan**, khususnya terhadap pedagang informal, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana perdagangan serta rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan penataan usaha.
- 4) **Keterbatasan sumber daya aparatur, anggaran, dan sarana pendukung**, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.
- 5) **Belum optimalnya koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan**, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, maupun masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM secara terpadu dan berkelanjutan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja

Rancangan awal Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan Visi dan Misi sebuah Organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan Strategi, Program, Dan Kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan Rencana Kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Staf Internal, Mitra Kerja, dan Masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga Rancangan Awal Perubahan Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan Perubahan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Renja yang final. Penyusunan kembali Perubahan Rencana Kerja berdasarkan hasil *review* ini akan memastikan bahwa semua Tujuan, Program, dan Kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Perubahan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai Tujuan Pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman per Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kab. Padang Pariaman				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kab. Padang Pariaman				
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Padang Pariaman	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	0.85		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Padang Pariaman	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	0.85		
	[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	Kab. Padang Pariaman	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasn	71		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	Kab. Padang Pariaman	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat	71		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
			ya					produktivitasnya			
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Padang Pariaman	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	100		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Padang Pariaman	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	100		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Padang Pariaman	Persentase Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	47 61		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Padang Pariaman	Persentase Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	47 61		
	[Meningkatnya	Kab.	Persentase			[Meningkatnya	Kab.	Persentase			

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	pekerja Indonesia yang terlindungi]	Padang Pariaman	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			pekerja Indonesia yang terlindungi]	Padang Pariaman	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
		Kab. Padang Pariaman	Persentase keselamatan dan perlindungan pekerja di perusahaan	58,20 %			Kab. Padang Pariaman	Persentase keselamatan dan perlindungan pekerja di perusahaan	58,20 %		
	Pengesahan Peraturan	Kab. Padang	Jumlah Perusahaan	20 Perusah		Pengesahan Peraturan	Kab. Padang	Jumlah Perusahaan	20 Perusaha		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pariaman	yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	aan		Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pariaman	yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	an		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	Persentase Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	Persentase Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja			
		Kab. Padang	Jumlah Data dan Informasi	10 Laporan			Kab. Padang	Jumlah Data dan	10 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
		Pariaman	Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				Pariaman	Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			
		Kab. Padang Pariaman	persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	59 %			Kab. Padang Pariaman	persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	59 %		
	Pencegahan dan Penyelesaian	Kab. Padang	Jumlah Perselisihan	10 Perkara		Pencegahan dan Penyelesaian	Kab. Padang	Jumlah Perselisihan	10 Perkara		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pariaman	yang Dicegah			Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pariaman	yang Dicegah			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kab. Padang Pariaman				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kab. Padang Pariaman				
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Padang Pariaman				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Padang Pariaman				
	[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Kab. Padang Pariaman	Persentase Pengawasan dan	25		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Kab. Padang	Persentase Pengawasan dan	25		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	koperasi]	n	Pemeriksaan Koperasi			koperasi]	Pariaman	Pemeriksaan Koperasi			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Padang Pariaman	pesentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	41.05 %		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Padang Pariaman	pesentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	41.05 %		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Kab. Padang Pariaman				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Kab. Padang Pariaman				

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	dalam Daerah Kabupaten/ Kota					dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	24 Unit Usaha			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	24 Unit Usaha		
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Padang Pariaman				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Padang Pariaman				
	[Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi]	Kab. Padang Pariaman	Persentase Koperasi Aktif	25		[Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi]	Kab. Padang Pariaman	Persentase Koperasi Aktif	25		
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan	Kab. Padang Pariaman	persentase koperasi yang dinilai	40 %		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan	Kab. Padang Pariaman	persentase koperasi yang dinilai	40 %		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n	kesehatan simpan pinjam			Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		kesehatan simpan pinjam			
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	24 Unit Usaha			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	24 Unit Usaha		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Padang Pariaman		25		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Padang Pariaman		25		
	[Meningkatnya produktivitas	Kab. Padang	Persentase Meningkatnya	40 %		[Meningkatnya produktivitas	Kab. Padang	Persentase Meningkatny	40 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	koperasi]	Pariaman	Koperasi yang Berkualitas			koperasi]	Pariaman	a Koperasi yang Berkualitas			
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15 Unit Usaha		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15 Unit Usaha		
	Koperasi dengan Keanggotaan	Kab. Padang				Koperasi dengan Keanggotaan	Kab. Padang				

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	Daerah Kabupaten/Kota	Pariaman				Daerah Kabupaten/Kota	Pariaman				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Padang Pariaman		0.33 0.36 65.51		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Padang Pariaman		0.33 0.36 65.51		
	[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	Kab. Padang Pariaman	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	24 %		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	Kab. Padang Pariaman	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke	24 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
			Pertumbuhan Wirausaha					Formal Pertumbuhan Wirausaha			
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Padang Pariaman	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Padang Pariaman	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra			
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan	20 Unit Usaha			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan	20 Unit Usaha		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
			Perizinan					n Perizinan			
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	150 Unit Usaha							
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Padang Pariaman				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Padang Pariaman				
	[Meningkatnya daya saing UMKM]	Kab. Padang Pariaman	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0.37 22		[Meningkatnya daya saing UMKM]	Kab. Padang Pariaman	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	0.37 22		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
								dan Ekspor			
	[Meningkatnya daya saing UMKM]	Kab. Padang Pariaman	Persentase Peningkatan Pengembangan usaha mikro yang berorientasi	1 %		[Meningkatnya daya saing UMKM]	Kab. Padang Pariaman	Persentase Peningkatan Pengembangan usaha mikro yang berorientasi	1 %		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5 Unit Usaha			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5 Unit Usaha		
	URUSAN PEMERINTAHAN	Kab. Padang				URUSAN PEMERINTAHAN	Kab. Padang				

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	PILIHAN	Pariaman				PILIHAN	Pariaman				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kab. Padang Pariaman				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kab. Padang Pariaman				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Padang Pariaman				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Padang Pariaman				
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kab. Padang Pariaman									
	[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	Kab. Padang Pariaman	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100		[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	Kab. Padang Pariaman	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
			(%) Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti					ti (%) Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	97 %		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	97 %		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran			

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
			Perangkat Daerah					n Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Administrasi keuangan yang terpenuhi	100 %		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Administrasi keuangan yang terpenuhi	100 %		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
		Kab.	Jumlah	12			Kab.	Jumlah	12		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
		Padang Pariaman	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			Padang Pariaman	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94 %		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94 %		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	10 Orang			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	10 Orang		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
			Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	94 %		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	94 %		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
		n	Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	90 %		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	90 %		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Padang Pariaman	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang	93 %		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Padang Pariaman	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang	93 %		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	Daerah	n	Urusan Pemerintah Daerah			Daerah		Urusan Pemerintah Daerah			
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
			yang Disediakan					Umum Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	96 %		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	96 %		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	4 Unit			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	4 Unit		
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Padang Pariaman	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi Persentase pelaku usaha yang	100 %		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Padang Pariaman	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi Persentase pelaku usaha yang	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
			memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
	[Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan]	Kab. Padang Pariaman	Persentase penerbitan TDG	100 %		[Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan]	Kab. Padang Pariaman	Persentase penerbitan TDG	100 %		
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen		
	Pengendalian Fasilitas	Kab. Padang	Persentase pemeriksaan	51 %		Pengendalian Fasilitas	Kab. Padang	Persentase pemeriksaan	51 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pariaman	fasilitas penyimpanan bahan berbahaya			Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pariaman	fasilitas penyimpanan bahan berbahaya			
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	12 Laporan			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan	12 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
			maupun Produsen B2 (P-B2)					Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Padang Pariaman	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	1.12		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Padang Pariaman	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	1.12		
	[Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	Kab. Padang Pariaman	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 %		[Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	Kab. Padang Pariaman	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 %		
	Pembangunan	Kab.	Jumlah	1 Unit		Pembangunan dan	Kab.	Jumlah	1 Unit		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Padang Pariaman	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Padang Pariaman	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Padang Pariaman				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Padang Pariaman				
	[Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Kab. Padang Pariaman	Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	57 6		[Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Kab. Padang Pariaman	Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan	57 6		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
			Barang Penting					Pokok Dan Barang Penting			
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	Persentase Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)	43 %		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	Persentase Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)	43 %		
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17 Kecamatan		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17 Kecamatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Padang Pariaman				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Padang Pariaman				
	[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	Kab. Padang Pariaman	Persentase penanganan pengaduan konsumen	3.33		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	Kab. Padang Pariaman	Persentase penanganan pengaduan konsumen	3.33		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Padang Pariaman	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	18,98 %		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Padang Pariaman	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	18,98 %		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1100 Unit			Kab. Padang Pariaman	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1100 Unit		
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Padang Pariaman				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Padang Pariaman				

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	Kab. Padang Pariaman	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	18		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	Kab. Padang Pariaman	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	18		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Padang Pariaman	persentase Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah	50 %		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Padang Pariaman	persentase Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah	50 %		
		Kab. Padang Pariaman	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	2 UMKM			Kab. Padang Pariaman	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 UMKM		

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
			Kabupaten/Kota					di Tingkat Kabupaten/Kota			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara Perencanaan di Tingkat Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional. Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Dokumen Strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan Fiskal Nasional, serta Instruksi dan Arahan Presiden menjadi pedoman utama dalam proses Perencanaan di Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan Arahan Kebijakan Nasional tersebut agar Tujuan Pembangunan Daerah tidak terpisah dari Kerangka Besar Pembangunan Nasional.

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi Kebijakan Nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan Nasional yang diampu oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman lebih pada menuangkan Kebijakan Nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan Nasional yang relevan dan menjadi Acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Kebijakan Nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah Pembangunan Daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional. Dengan demikian, setiap Program dan Kegiatan yang direncanakan pada Tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai Kebijakan, Rencana, dan Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Salah satu Kebijakan Nasional yang menjadi acuan penting dalam Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM

Kabupaten Padang Pariaman adalah RPJMN yang menetapkan Prioritas Pembangunan selama lima Tahun. RPJMN menguraikan Program Prioritas di berbagai sektor, seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Ekonomi, yang harus diimplementasikan di Tingkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah harus menafsirkan Prioritas Nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan Program dan Kegiatan yang relevan dengan kondisi serta Kebutuhan Daerah, namun tetap mengacu pada Tujuan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara Perencanaan Daerah dan Nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya Pembangunan di Daerah mendukung Visi dan Misi Nasional, serta memperkuat Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor dan Wilayah. Dengan demikian, Pembangunan Daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung Pencapaian Target Pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah Sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

Tabel 3.1

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera barat madani yang Unggul dan Berkelanjutan	Padang Pariaman Berjaya
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat pengetahuan, terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama berdasarkan Falsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan ketentraman dan ketertiban

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera barat madani yang Unggul dan Berkelanjutan	Padang Pariaman Berjaya
2.	Struktur Ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik secara Berkelanjutan dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas	Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasis Peberdayaan Masyarakat
4	Mencapai Lingkugan Hidup yang Berkelanjutan	Eningkatkan usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Mengah serta Ekonomi Digital	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan Terampil serta Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal dan Menggerakkan Sektor Pendidikan Non Formal
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata	Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratif Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan
6	Penegakkan Sistem Hukum yang Berbasis Korupsi, Bermartabat dan Terpecaya	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kearifan Lokal
7	Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas	Meningkatkan sumber-sumber Pendanaan dan Ketepatan Alokasi Investasi melalui Penciptaan Illim yang Kondusif untuk Mengembangkan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya		
9	Sinergi Pemerintah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.2

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosal kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
	infrastruktur	Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah. Tujuan utama Perubahan Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua Program dan Kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap Perangkat Daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi Kinerja setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, Perangkat Daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi Perangkat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pembangunan Daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua Program dan Kegiatan dalam melaksanakan Misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padag Pariaman Tahun 2025 adalah ” Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas” dengan Indikator Tujuan ” Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas.”

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	89
	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal	Persentase	67,80%
		PDRB Per Kapita ADHB	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Volume Usaha koperasi	Persentase	10 %
		Ekspor Barang dan Jasa	Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Omzet Usaha UMKM	Persentase	4 %

			Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Rasio Penduduk yang bekerja		70,94%
		Gini Rasio	Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Persentase Keselamatan dan Perlindungan		60 %
		Tingkat Kemiskinan				

3.3 Program dan Kegiatan

- a.** Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan Misi Kepala Daerah adalah panduan utama bagi semua Perangkat Daerah, termasuk Dinas, dalam menyusun Program dan Kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan Misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai Visi tersebut. Misalnya, jika Visi Kepala Daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dan Infrastruktur Berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Sarana Publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi Kepala Daerah yang mungkin menitikberatkan pada Peningkatan Layanan Publik juga harus direspons oleh Dinas dengan merancang Program yang meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan, baik itu dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan, atau Administrasi Publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman mendukung Visi Misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada Pengentasan Kemiskinan, Perlindungan Lingkungan, dan Pencapaian Kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas Pendidikan (*Goal 4*), memastikan akses air bersih dan sanitasi (*Goal 6*), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (*Goal 8*). Setiap Program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan Kegiatan Dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan Kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	Kab. Padang Pariaman	0.85	164.982.500, 00	DAU		0.85	164.982.500, 00
	[Meningkatkan produktivitas tenaga kerja]	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Kab. Padang Pariaman	71	164.982.500, 00	DAU		71	164.982.500, 00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kab. Padang Pariaman	100	164.982.500, 00	DAU		100	164.982.500, 00
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Padang Pariaman	32 Orang	164.982.500, 00	DAU		32 Orang	164.982.500, 00
	PROGRAM	Persentase	Kab.	47	50.012.600,0	DAU		47	50.012.600,0

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	HUBUNGAN INDUSTRIAL	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	Padang Pariama n	61	0			61	0
	[Meningkatkan pekerja Indonesia yang terlindungi]	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)							
		Persentase keselamatan dan perlindungan pekerja di perusahaan	Kab. Padang Pariama n	58,20 %	35.912.050, 00	DAU		58,20 %	35.912.050, 00
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Padang Pariama n	20 Perusaha an	20.000.050,0 0	DAU		20 Perusaha an	20.000.050,0 0
		Persentase Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	Kab. Padang Pariama n			DAU			
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS	Kab. Padang Pariama n	10 Laporan	15.912.000,0 0	DAU		10 Laporan	15.912.000,0 0

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan							
		persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Kab. Padang Pariama n	59 %	14.100.550,0 0	DAU		59 %	14.100.550,0 0
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Padang Pariama n	10 Perkara	14.100.550,0 0	DAU		10 Perkara	14.100.550,0 0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		Kab. Padang Pariama n						
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Kab. Padang Pariama n						
	[Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi]	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kab. Padang Pariama n	25	21.400.000,0 0	DAU		25	21.400.000,0 0
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,	pesentase koperasi yang diperiksa dan	Kab. Padang	41.05 %	21.400.000,0 0	DAU		41.05 %	21.400.000,0 0

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	diawasi	Pariama n						
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI [Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi]	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Padang Pariama n	24 Unit Usaha	21.400.000, 00	DAU		24 Unit Usaha	21.400.000, 00
		Persentase Koperasi Aktif	Kab. Padang Pariama n	25	15.500.000,0 0			25	15.500.000,0 0
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang dinilai kesehatan simpan pinjam	Kab. Padang Pariama n	40 %	15.500.000,0 0	DAU		40 %	15.500.000,0 0
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Padang Pariama n	24 Unit Usaha	15.500.000,0 0	DAU		24 Unit Usaha	15.500.000,0 0

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI [Meningkatkan produktivitas koperasi]	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Kab. Padang Pariama n	25	213.560.000, 00	DAU		25	213.560.000, 00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariama n	40 %	213.560.000, 00	DAU		40 %	213.560.000, 00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) [Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Kab. Padang Pariama	15 Unit Usaha 0.33 0.36	213.560.000, 00 50.000.000,0 0	DAU		15 Unit Usaha 0.33 0.36	213.560.000, 00 50.000.000,0 0

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	n	65.51				65.51	
		Pertumbuhan Wirausaha Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Kab. Padang Pariama n	24 %	50.000.000,0 0	DAU		24 %	50.000.000,0 0
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Padang Pariama n	20 Unit Usaha	10.000.000,0 0	DAU		20 Unit Usaha	10.000.000,0 0
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Padang Pariama n	150 Unit Usaha	20.000.000,0 0	DAU		150 Unit Usaha	20.000.000,0 0
		Persentase Koperasi yang Memiliki Izin	Kab. Padang	0.37	5.000.000,00	DAU		0.37	5.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM [Meningkatkan daya saing UMKM]								

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	[Meningkatnya daya saing UMKM]	Usaha Simpan Pinjam Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor Persentase Peningkatan Pengembangan usaha mikro yang berorientasi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Pariaman	22				22	
			Kab. Padang Pariaman	1 %	5.000.000,00	DAU		1 %	5.000.000,00
			Kab. Padang Pariaman	5 Unit Usaha	5.000.000,00	DAU		5 Unit Usaha	5.000.000,00
			Kab. Padang Pariaman		6.551.074.88 4,00	DAU			6.551.074.88 4,00
			Kab. Padang Pariaman		6.551.074.88 4,00	DAU			6.551.074.88 4,00
			Kab. Padang Pariaman		6.260.080.28 4,00	DAU			6.260.080.28 4,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Kab.		6.551.074.88	DAU			6.551.074.88
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA URUSAN		Kab.		6.551.074.88	DAU			6.551.074.88

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMERINTAHAN PILIHAN		Padang Pariama n Kab. Padang Pariama n		4,00				4,00
	[Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%)		100	6.260.080.28 4,00	DAU		100	6.260.080.28 4,00
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariama n	97 %	29.990.000,0 0	DAU		97 %	29.990.000,0 0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariama n	2 Dokumen	13.896.000,0 0	DAU		2 Dokumen	13.896.000,0 0
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Padang Pariama n	5 Laporan	16.094.000,0 0	DAU		5 Laporan	16.094.000,0 0

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terpenuhi	Kab. Padang Pariama n	100 %	5.566.715.20 4,00	DAU		100 %	5.566.715.20 4,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Padang Pariama n	42 Orang/bu lan	5.434.115.20 4,00	DAU		42 Orang/bu lan	5.434.115.20 4,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Padang Pariama n	1 Dokumen	123.560.000, 00	DAU		1 Dokumen	123.560.000, 00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Padang Pariama n	12 Laporan	9.040.000,00	DAU		12 Laporan	9.040.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariama n	94 %	11.000.000,0 0	DAU		94 %	11.000.000,0 0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Padang Pariama n	10 Orang	11.000.000,0 0	DAU		10 Orang	11.000.000,0 0

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariama n	94 %	164.169.000, 00	DAU		94 %	164.169.000, 00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Padang Pariama n	1 Laporan	7.590.000,00	DAU		1 Laporan	7.590.000,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Padang Pariama n	12 Laporan	156.579.000, 00	DAU		12 Laporan	156.579.000, 00
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana	Kab. Padang Pariama n	90 %	23.333.000,0 0	DAU		90 %	23.333.000,0 0
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariama n	1 Unit	23.333.000,0 0	DAU		1 Unit	23.333.000,0 0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Padang Pariama n	1 Unit	23.333.000,0 0	DAU		1 Unit	23.333.000,0 0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariama n	93 %	410.113.080, 00	DAU		93 %	410.113.080, 00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Padang Pariama n	12 Laporan	39.606.900,0 0	DAU		12 Laporan	39.606.900,0 0

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Padang Pariama n	12 Laporan	60.151.000,0 0	DAU		12 Laporan	60.151.000,0 0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariama n	12 Laporan	310.355.180, 00	DAU		12 Laporan	310.355.180, 00
		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariama n	96 %	54.760.000,0 0	DAU		96 %	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Padang Pariama n	10 Unit	24.000.000,0 0	DAU		10 Unit	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Padang Pariama n	10 Unit	10.760.000,0 0	DAU		10 Unit	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	Kab. Padang Pariama n	4 Unit	20.000.000,0 0	DAU		4 Unit	
	PROGRAM PERIZINAN		Kab.	70	16.599.300,0	DAU		70	16.599.300,0

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Padang Pariama n Kab. Padang Pariama n		0				0
	[Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan]	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi		100 %	8.299.750,00	DAU		100 %	8.299.750,00
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persentase penerbitan TDG	Kab. Padang Pariama n	100 %	8.299.750,00	DAU		100 %	8.299.750,00
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Padang Pariama n	1 Dokumen	8.299.750,00	DAU		1 Dokumen	8.299.750,00
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya	Kab. Padang Pariama n	51 %	8.299.550,00	DAU		51 %	8.299.550,00

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Daerah Kabupaten/ Kota PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN [Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi] Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Padang Pariama n	12 Laporan	8.299.550,00	DAU		12 Laporan	8.299.550,00
			Kab. Padang Pariama n		8.500.500,00	DAU			8.500.500,00
		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Padang Pariama n	1.12	8.500.500,00	DAU		1.12	8.500.500,00
		Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Kab. Padang Pariama n	100 %	8.500.500,00	DAU		100 %	8.500.500,00
		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Padang Pariama	1 Unit	8.500.500,00	DAU		1 Unit	8.500.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING [Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting] Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang) terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	n Kab. Padang Pariama n Kab. Padang Pariama n Kab. Padang Pariama n Kab. Padang Pariama n Kab. Padang Pariama n	 57 6 43 % 17 Kecamata n 12 Laporan	16.600.500,0 0 16.600.500,0 0 8.300.500,00 8.300.000,00 8.300.000,00	DAU DAU DAU DAU		 57 6 43 % 17 Kecamata n 12 Laporan	16.600.500,0 0 16.600.500,0 0 8.300.500,00 8.300.000,00 8.300.000,00

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN [Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk]	Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Padang Pariama n		40.994.700,0 0	DAU			40.994.700,0 0
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	Kab. Padang Pariama n	3.33	40.994.700,0 0	DAU		3.33	40.994.700,0 0
		Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	Kab. Padang Pariama n	18,98 %	40.994.700,0 0	DAU		18,98 %	40.994.700,0 0
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Padang Pariama n	1100 Unit	40.994.700,0 0	DAU		1100 Unit	40.994.700,0 0
	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI [Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri] Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan				208.299.600, 00	DAU			208.299.600, 00
		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Kab. Padang Pariama n	18	208.299.600, 00	DAU		18	208.299.600, 00
		persentase Keikutsertaan promosi produk unggulan	Kab. Padang Pariama n	50 %	208.299.600, 00	DAU		50 %	208.299.600, 00

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penggunaan Produk Dalam Negeri	daerah Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	n Kab. Padang Pariama n	2 UMKM	208.299.600, 00	DAU		2 UMKM	208.299.600, 00

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****Tabel 4.1 MATRIKS RENJA FORMAT SIPD**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONA L	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						7.071.529.984,00				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						520.455.100,00				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						214.995.100,00				
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						164.982.500,00				

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	0.89	0.84	0.84	0.85	164.982.500,00	-	DAU	-	-
		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	74	70	70	71					
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	-			100 %	164.982.500,00			-	-
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				32 Orang	164.982.500,00	Kab. Padang Pariaman , Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kecamat an, Semua Kel/Desa			
2.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						50.012.600,00				
	[Meningkatkan pekerja Indonesia yang terlindungi]	Persentase Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS (Ketenagakerjaan)	49 65	47 60	47 60	47 61	50.012.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselamatan dan perlindungan pekerja di perusahaan	-			58,20 %	35.912.050,00			-	-
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				20 Perusahaan	20.000.050,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				10 Laporan	15.912.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	-			59 %	14.100.550,00			-	-
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	14.100.550,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						305.460.000,00				
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						21.400.000,00				

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	60	21	25	25	21.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	pesentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	-			41.05 %	21.400.000,00			-	-
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				24 Unit Usaha	21.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						15.500.000,00				

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi]	Persentase Koperasi Aktif	60	21	25	25	15.500.000,00	-	-	-	-
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang dinilai kesehatan simpan pinjam	-			40 %	15.500.000,00			-	-
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				24 Unit Usaha	15.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						213.560.000,00				
	[Meningkatnya produktivitas koperasi]	Persentase Meningkatnya Koperasi yang	60	21	25	25	213.560.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Berkualitas							(DAU)		
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-			40 %	213.560.000,00			-	-
		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				15 Unit Usaha	213.560.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						50.000.000,00				

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0.45	0.3	0.34	0.33	50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
			0.46	0.32	0.35	0.36					
		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	65.6	65.5	65.5	65.51					
		Pertumbuhan Wirausaha									
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	-			24 %	50.000.000,00			-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0				0 0	20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				20 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				150 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						5.000.000,00				
	[Meningkatnya daya saing UMKM]	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0.47 30	0.31 20	0.35 20	0.37 22	5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Pengembangan usaha mikro yang berorientasi	-			1 %	5.000.000,00			-	-
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta				5 Unit Usaha	5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Desain dan Teknologi						Kel/Desa			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.551.074.884,0 0				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						6.551.074.884,0 0				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.260.080.284,0 0				
	[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	6.260.080.284,0 0	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
		Persentase Temuan									

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BPK yang ditindak lanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	-			97 %	29.990.000,00			-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	13.896.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				5 Laporan	16.094.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Kecamatan, Semua Kel/Desa			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terpenuhi	-			100 %	5.566.715.204,00			-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	5.434.115.204,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	123.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kel/Desa			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	9.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			94 %	11.000.000,00			-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	11.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONA L	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	-			94 %	164.169.000,00			-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	7.590.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	156.579.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur	-			90 %	23.333.000,00			-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah	Perangkat Daerah									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	23.333.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			93 %	410.113.080,00			-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	39.606.900,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONA L	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60.151.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	310.355.180,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			96 %	54.760.000,00			-	-
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				10 Unit	24.000.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dibayarkan Pajaknya						an, Semua Kel/Desa			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.760.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi				4 Unit	20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						16.599.300,00				

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan]	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	79 90	63 70	63 70	70	16.599.300,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG	-			100 %	8.299.750,00			-	-
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	8.299.750,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kel/Desa			
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya	-			51 %	8.299.550,00			-	-
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				12 Laporan	8.299.550,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						8.500.500,00				
	[Meningkatkan kualitas saranan perdaganagan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	3.01	3.33	3.33	1.12	8.500.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	-			100 %	8.500.500,00			-	-
		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	8.500.500,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						16.600.500,00				
	[Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	6 72	15 53	53 6	57 6	16.600.500,00	-	-	-	-
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)	-			43 %	8.300.500,00			-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONA L	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	8.300.500,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			17 Kecamatan	8.300.000,00			-	-
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	8.300.000,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						40.994.700,00				
	[Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk]	Persentase penanganan pengaduan konsumen	3.33	3.33	3.33	3.33	40.994.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	-			18,98 %	40.994.700,00			-	-
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1100 Unit	40.994.700,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

Renja Perubahan 2025 DISDAGNAKERKOP DAN UKM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						208.299.600,00				
	[Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	18	20	20	18	208.299.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	persentase Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah	-			50 %	208.299.600,00			-	-
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				2 UMKM	208.299.600,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	7.071.529.984,00										

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan Program dan Kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan Alokasi Anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk Tim atau Komite Pengawasan yang bertugas untuk memantau Penggunaan Anggaran agar sesuai dengan Rencana Kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan Program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap Program dan Kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh *stakeholder* di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan Mingguan, Bulanan, atau Tahunan yang akan menjadi

dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk Tim Evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan Visi Pembangunan Dinas yang Lebih Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan.

Pariaman, 04 Juli 2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



JON KENEDI, S. Sos, M.M

Pembina Utama Muda NIP 19690525 198903 1 007

HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH DISDAGNAKERKOP

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	✓
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	